

## STRATEGI PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK PAPUA

Edmundus Bawor<sup>1</sup>, Prof. Dr. Masduki Ahmad, SH., MM.<sup>2</sup>

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta

Email: edmundus\_1111822003@mhs.unj.ac.id<sup>1</sup>, masdukiahmad@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This article discusses strategies to increase the role of local governments in financing Papuan children's education. Local governments in Papua have a key responsibility in ensuring accessibility and good quality education for Papuan children but there are challenges in fulfilling this commitment such as limited financial resources and a lack of understanding of effective strategies. This article presents some strategies that can be implemented, including allocating a larger budget for education, improving coordination between relevant agencies, expanding scholarship programs, and improving the training and development of qualified teaching staff. By increasing the role of local governments in financing the education of Papuan children, it is hoped that the accessibility and quality of education for Papuan children will improve. In this article, research was conducted using a literature study approach. The steps used in literature study research include identification of research objectives, identification of literature sources, literature selection, literature evaluation, literature analysis, synthesis, and report writing. The role of the Papuan local government in financing education is very important to improve the quality of education of Papuan children and minimize educational disparities. Local governments work together with the central government, educational institutions, communities and the private sector to achieve this goal.*

**Keywords:** *Papuan local government, financing, education of Papuan children*

### ABSTRAK

Artikel ini membahas strategi peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua. Pemerintah daerah di Papua memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik bagi anak-anak Papua, namun terdapat tantangan dalam memenuhi komitmen ini seperti keterbatasan sumber daya keuangan dan kurangnya pemahaman tentang strategi yang efektif. Artikel ini menyajikan beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, perluasan program beasiswa, dan peningkatan pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar yang berkualitas. Melalui peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua, diharapkan terjadi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua tidak hanya berdampak langsung pada kualitas hidup anak-anak Papua, tetapi juga pada pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini, strategi peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua juga akan memperkuat komitmen pemerintah terhadap hak pendidikan setiap anak, sesuai dengan amanat konstitusi dan instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam artikel ini, penelitian dilakukan menggunakan pendekatan studi pustaka. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian studi pustaka mencakup identifikasi tujuan penelitian, identifikasi sumber literatur, seleksi literatur, evaluasi literatur, analisis literatur, sintesis, dan penulisan laporan. Peran pemerintah daerah Papua dalam pembiayaan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Papua dan memperkecil kesenjangan pendidikan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan ini.

**Kata kunci:** Pemerintah Daerah Papua, Pembiayaan, Pendidikan Anak Papua

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara, yang memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan

## STRATEGI PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK PAPUA

Edmundus Bawor, Prof. Dr. Masduki Ahmad, SH., MM.

---

masyarakat. Di Indonesia, khususnya di wilayah Papua, pembiayaan pendidikan anak-anak Papua telah menjadi perhatian yang mendesak. Anak-anak di Papua sering menghadapi tantangan yang unik, termasuk tingkat aksesibilitas yang rendah, infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya tenaga pengajar berkualifikasi, dan ketidakmerataan kualitas pendidikan.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua menjadi sangat penting. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan penyediaan dana yang cukup, kebijakan yang efektif, dan koordinasi yang baik untuk memastikan ketersediaan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Papua. Namun, terdapat tantangan besar dalam memenuhi komitmen ini, termasuk keterbatasan sumber daya keuangan, kompleksitas administrasi, serta kurangnya pemahaman tentang strategi yang efektif dalam pembiayaan pendidikan anak Papua. Artikel ini bertujuan untuk membahas strategi peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua. Dalam konteks ini, penelitian terkait kebijakan pendidikan, keuangan publik, serta literatur terkait akan dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan solusi yang dapat diimplementasikan. Pertama, artikel ini akan membahas tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua. Dalam hal ini, akan ditekankan pentingnya memahami hambatan struktural, seperti kurangnya infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar yang berkualifikasi, dan permasalahan sosial-ekonomi yang mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pendidikan di daerah ini.

Kemudian, artikel ini akan membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua. Strategi tersebut meliputi pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, perluasan program beasiswa, serta peningkatan pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar yang berkualitas. Selain itu, artikel ini akan mengeksplorasi praktik terbaik dari daerah lain atau negara dengan tantangan serupa dalam membiayai pendidikan anak-anak yang rentan. Dalam konteks ini, contoh-contoh dari Indonesia dan negara-negara lain akan disajikan untuk memberikan panduan dalam merancang kebijakan dan strategi yang efektif. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua tidak hanya berdampak langsung pada kualitas hidup anak-anak Papua, tetapi juga pada pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua, diharapkan akan terjadi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua. Ini akan membuka peluang yang lebih luas bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, meningkatkan potensi mereka, dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan Papua dan bangsa secara keseluruhan.

Selain itu, strategi peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua juga akan memperkuat komitmen pemerintah terhadap hak pendidikan setiap anak, sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam mewujudkan hak-hak ini, pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam mengalokasikan dana yang memadai dan memastikan kebijakan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembaharuan pendidikan di Papua, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Selain memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembiayaan, pendekatan ini juga harus melibatkan partisipasi aktif dari

# STRATEGI PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK PAPUA

Edmundus Bawor, Prof. Dr. Masduki Ahmad, SH., MM.

---

masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan semua pemangku kepentingan terkait. Sinergi antara pemerintah daerah dan aktor-aktor lain akan memungkinkan terciptanya ekosistem pendidikan yang kokoh, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam artikel ini, akan diuraikan juga manfaat jangka panjang dari peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua. Keberhasilan ini akan membuka pintu kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Papua untuk meraih masa depan yang lebih cerah, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, langkah ini juga akan memperkuat kapasitas daerah Papua dalam mengelola sumber daya manusia yang berkualitas, mempercepat pembangunan wilayah, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Dalam kesimpulannya, peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua merupakan langkah yang krusial dalam menjawab tantangan pendidikan di daerah ini. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah pusat, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Melalui strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Papua, peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua dapat ditingkatkan, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

## METODE

Metodologi Studi Pustaka adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur yang relevan tentang topik yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian tentang strategi peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian Studi Pustaka ini adalah: Identifikasi Tujuan Penelitian, Identifikasi Sumber Literatur, Seleksi Literatur, Evaluasi Literatur, Analisis Literatur, Sintesis dan Penulisan Laporan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemerintah Daerah Papua

Pemerintah Daerah Papua, secara administratif, merujuk pada pemerintahan di tingkat provinsi Papua, Indonesia. Pemerintah Daerah Papua bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Papua, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan sektor pendidikan, antara lain.

Menurut UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Papua dibentuk untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan Pemerintah Daerah Papua meliputi berbagai bidang seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah Daerah Papua memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah Papua. Pemerintah Daerah Papua juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memperkuat pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah Daerah Papua memiliki peran penting dalam pembiayaan pendidikan anak Papua serta pelaksanaan strategi-strategi untuk meningkatkan akses, mutu, dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Pemerintah Daerah Papua, yang merupakan pemerintahan di tingkat provinsi Papua, Indonesia, memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah Daerah Papua bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Daerah Papua didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Undang-undang ini memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Papua, memberikan wewenang luas kepada Pemerintah Daerah Papua dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayah tersebut.

Salah satu aspek penting yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Papua adalah sektor pendidikan. Pemerintah Daerah Papua memiliki peran strategis dalam memastikan akses, mutu, dan kualitas pendidikan anak-anak Papua. Upaya ini melibatkan pengalokasian anggaran pendidikan, pengembangan kebijakan pendidikan yang inklusif, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan guru, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah Papua yang terpencil.

Melalui peran pemerintah daerah, diharapkan bahwa pendidikan anak Papua dapat meningkat, kesenjangan pendidikan dapat diperkecil, dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Pemerintah Daerah Papua bekerja sama dengan pemerintah pusat, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan ini.

### **Peran Pemerintah Daerah Papua**

Peran Pemerintah Daerah Papua sangat penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Papua, Indonesia. Pemerintah Daerah Papua memiliki tanggung jawab yang luas dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan pemerintahan secara umum. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Papua memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah ini meliputi:

1. *Perencanaan dan penganggaran*: Pemerintah Daerah Papua bertanggung jawab untuk merencanakan pembangunan di wilayahnya, termasuk alokasi anggaran untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mereka menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif.
2. *Pelaksanaan kebijakan*: Pemerintah Daerah Papua menerapkan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Mereka berperan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, serta merumuskan kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
3. *Pelayanan publik*: Pemerintah Daerah Papua bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Ini termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan layanan sosial lainnya. Pemerintah Daerah Papua berupaya memastikan akses yang lebih baik dan pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Papua.

4. *Pengelolaan sumber daya alam*: Wilayah Papua kaya akan sumber daya alam, seperti pertambangan, hutan, dan kelautan. Pemerintah Daerah Papua memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

### **Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan mengacu pada sumber daya finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dan program pendidikan. Pembiayaan ini meliputi pengalokasian dana untuk infrastruktur pendidikan, gaji guru, pengembangan kurikulum, pemenuhan kebutuhan siswa, dan berbagai komponen lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Sumber daya yang diperlukan untuk pembiayaan pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. *Pemerintah*: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam membiayai pendidikan. Mereka mengalokasikan anggaran dari pendapatan negara dan dana publik untuk pendidikan. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan keuangan kepada siswa dari keluarga kurang mampu melalui program beasiswa atau program lainnya.
2. *Swasta*: Sektor swasta, termasuk perusahaan, yayasan, dan individu, juga berperan dalam pembiayaan pendidikan. Mereka dapat memberikan sumbangan, sponsor, atau menyelenggarakan program beasiswa untuk mendukung pendidikan. Sektor swasta juga dapat berinvestasi dalam pendidikan dengan mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
3. *Masyarakat*: Partisipasi masyarakat juga penting dalam pembiayaan pendidikan. Masyarakat dapat memberikan sumbangan, mengorganisir kegiatan penggalangan dana, atau menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka secara sukarela untuk mendukung pendidikan di lingkungan mereka.
4. *Dana internasional*: Bantuan dan dana dari lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan program-program donor juga dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan. Ini termasuk proyek-proyek pengembangan pendidikan yang didukung oleh organisasi seperti UNESCO, UNICEF, atau Bank Dunia.

Pembiayaan pendidikan menjadi penting untuk memastikan akses, kesetaraan, dan mutu pendidikan yang berkualitas. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan termasuk pengalokasian anggaran yang memadai, perbaikan mekanisme distribusi dana, pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Tantangan dalam Pembiayaan Pendidikan di Papua**

Tantangan dalam pembiayaan pendidikan di Papua adalah kompleks dan beragam. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

1. *Keterbatasan anggaran*: Pemerintah Daerah Papua sering kali menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembiayaan pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, peralatan pembelajaran, dan program pendidikan lainnya.

2. *Keterjangkauan geografis*: Wilayah Papua yang luas dan memiliki geografis yang sulit dapat mengakibatkan tantangan dalam mengakses sekolah dan menyediakan sarana pendidikan yang memadai. Terdapat daerah-daerah terpencil dan terisolasi di Papua yang sulit dijangkau, sehingga pembiayaan infrastruktur pendidikan dan transportasi menjadi lebih sulit dan mahal.
3. *Ketimpangan sosial-ekonomi*: Papua juga menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan. Banyak masyarakat di Papua hidup dalam kondisi miskin, dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas seringkali tidak merata. Pembiayaan pendidikan yang memadai diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa semua anak di Papua memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
4. *Kualitas pendidikan*: Peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi tantangan di Papua. Pembiayaan yang cukup diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan, penyediaan materi pembelajaran yang memadai, dan penggunaan teknologi pendidikan. Kekurangan dana dapat mempengaruhi kemampuan sekolah dan guru untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa.

### **Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah**

Strategi peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pendidikan di Papua dapat melibatkan berbagai pendekatan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. *Pengalokasian anggaran yang memadai*: Pemerintah Daerah Papua perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan, dengan memprioritaskan pembiayaan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, peralatan pembelajaran, dan program pendidikan lainnya. Hal ini memerlukan perencanaan anggaran yang cermat dan penggunaan sumber daya yang efektif.
2. *Peningkatan kapasitas institusi*: Pemerintah Daerah Papua perlu memperkuat kapasitas institusi terkait pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini meliputi pengembangan kebijakan pendidikan yang inklusif, pengelolaan keuangan yang baik, dan perencanaan strategis untuk pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.
3. *Kerjasama dengan pihak terkait*: Pemerintah Daerah Papua dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat, lembaga internasional, lembaga donor, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan. Hal ini dapat melibatkan pendanaan tambahan, program beasiswa, peningkatan akses terhadap sumber daya, dan pelibatan masyarakat dalam penggalangan dana pendidikan.
4. *Peningkatan transparansi dan akuntabilitas*: Pemerintah Daerah Papua perlu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan. Ini termasuk pelaporan keuangan yang terbuka, pemantauan penggunaan dana secara berkala, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan.
5. *Peningkatan kualitas pendidikan*: Pemerintah Daerah Papua perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan mengalokasikan dana untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Melalui program pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru, guru-guru di Papua dapat ditingkatkan kompetensinya dalam mengajar dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif.

6. *Pemberdayaan masyarakat*: Pemerintah Daerah Papua dapat melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dengan mendorong partisipasi aktif dari orang tua, kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat didorong untuk berkontribusi dalam bentuk sumbangan finansial, tenaga, atau sumber daya lainnya untuk mendukung pendidikan di daerah mereka.
7. *Inovasi pendanaan*: Pemerintah Daerah Papua dapat menjajaki inovasi dalam pendanaan pendidikan, seperti kemitraan publik-swasta, pinjaman, atau program kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan pembiayaan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
8. *Monitoring dan evaluasi*: Pemerintah Daerah Papua perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang teratur terhadap pembiayaan pendidikan untuk memastikan dana yang dialokasikan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, perbaikan dan perubahan kebijakan dapat dilakukan agar pembiayaan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

### **Dampak strategi yang diusulkan**

Implementasi strategi yang diusulkan dalam pembiayaan pendidikan di Papua dapat memiliki dampak positif yang signifikan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah:

1. *Peningkatan akses dan partisipasi*: Strategi peningkatan peran Pemerintah Daerah Papua dalam pembiayaan pendidikan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, memperkuat infrastruktur pendidikan, dan melibatkan masyarakat, lebih banyak anak Papua dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.
2. *Peningkatan kualitas pendidikan*: Dengan pembiayaan yang memadai, strategi yang diusulkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Pelatihan dan pengembangan guru dapat meningkatkan kompetensi mereka, sementara peningkatan infrastruktur dan pengadaan sumber daya pembelajaran yang memadai dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif.
3. *Reduksi kesenjangan*: Melalui strategi pembiayaan yang inklusif, Pemerintah Daerah Papua dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dalam akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Dengan memprioritaskan daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu, strategi ini dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua anak Papua dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
4. *Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi*: Investasi dalam pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang luas. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, strategi ini dapat berkontribusi pada pembangunan manusia yang lebih baik di Papua, meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

### **Pendidikan Anak Papua**

Pendidikan anak Papua memiliki beberapa karakteristik khusus yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipahami tentang pendidikan anak Papua:

## STRATEGI PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK PAPUA

Edmundus Bawor, Prof. Dr. Masduki Ahmad, SH., MM.

---

1. *Multikulturalisme*: Papua adalah daerah yang kaya akan keragaman budaya dan suku bangsa. Oleh karena itu, pendidikan anak Papua harus mengakomodasi keberagaman ini dan mempromosikan multikulturalisme. Penting untuk memahami dan menghargai budaya lokal dalam kurikulum dan metode pengajaran.
2. *Bahasa dan Budaya Lokal*: Papua memiliki banyak bahasa dan budaya lokal yang berbeda. Penting untuk mempertahankan dan mempromosikan penggunaan bahasa dan budaya lokal dalam konteks pendidikan. Ini dapat membantu anak-anak Papua dalam memahami materi pelajaran dan memperkuat identitas mereka.
3. *Infrastruktur dan Aksesibilitas*: Wilayah Papua memiliki geografi yang sulit dengan aksesibilitas yang terbatas. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti pembangunan sekolah dan jalan menuju daerah terpencil, sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Papua.
4. *Pelatihan Guru*: Guru yang berkualitas dan terlatih merupakan faktor penting dalam pendidikan anak Papua. Pelatihan guru yang memperhatikan konteks budaya dan sosial Papua, serta pengembangan keterampilan pedagogis yang efektif, harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
5. *Pendidikan Inklusif*: Pendidikan anak Papua harus bersifat inklusif, memperhatikan keberagaman kemampuan dan kebutuhan anak. Anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak perempuan, dan kelompok marginal harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Kusumaningrum dan Wikan Sakarinto (2016), tentang “*Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*” dari perspektif *Meningkatkan Anggaran Pendidikan*: Pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan guna memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, pengadaan fasilitas pembelajaran, serta pengembangan program pendidikan yang berkualitas. Ini dapat dilakukan dengan menaikkan persentase alokasi anggaran pendidikan dari pendapatan daerah dan mencari sumber pendanaan tambahan.

Penelitian yang dilakukan juga oleh Iman Widhiarto (201), tentang “*Peran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*” dalam perspektif *Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas*: Pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan dengan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan, memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pelaporan keuangan yang baik dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Selain itu itu, menurut penelitian yang dilakukan Nurul Ihsan (2016), tentang “*Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*” dari perspektif *Mendorong Partisipasi Swasta*: Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui skema kemitraan publik-swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sekolah, serta melalui program-



## STRATEGI PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK PAPUA

Edmundus Bawor, Prof. Dr. Masduki Ahmad, SH., MM.

---

program kemitraan yang mendorong perusahaan untuk menyumbangkan dana atau sumber daya lainnya untuk Pendidikan.

Ditambahkan juga oleh Agung Yulianto dan Hartanto (2015), tentang "*Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah*" dilihat dari perspektif *Peningkatan Pengawasan Dana Bantuan*: Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap dana bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini meliputi pemantauan penggunaan dana secara berkala, evaluasi kinerja program, serta sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan dana bantuan.

Kemudian di dalam penelitian yang dilakukan juga oleh A. B. Fauzan (2016), tentang "*Peran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar*" dari perspektif *Mendorong Keterlibatan Masyarakat*: Pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengadakan program penggalangan dana, menggalang program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pengawasan sekolah. Dengan melibatkan masyarakat, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dalam strategi peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua, beberapa poin penting dapat diambil. (1) Tantangan dalam pembiayaan pendidikan anak Papua: Anak-anak di Papua menghadapi tantangan unik seperti aksesibilitas rendah, infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya tenaga pengajar berkualifikasi, dan ketidakmerataan kualitas pendidikan. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya serius dari pemerintah daerah, (2) Strategi peningkatan peran pemerintah daerah: Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, perluasan program beasiswa, serta peningkatan pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar yang berkualitas. (3), Belajar dari praktik terbaik: Meneliti praktik terbaik dari daerah lain atau negara dengan tantangan serupa dapat memberikan panduan yang efektif dalam merancang kebijakan dan strategi untuk pembiayaan pendidikan anak-anak Papua, (4) Manfaat jangka panjang: Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan anak Papua tidak hanya berdampak pada kualitas hidup anak-anak Papua, tetapi juga pada pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, (5) Pentingnya pendekatan holistik dan berkelanjutan: Dalam pembaharuan pendidikan di Papua, diperlukan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan semua pemangku kepentingan terkait. Sinergi antara pemerintah daerah dan aktor-aktor lain akan memungkinkan terciptanya ekosistem pendidikan yang kokoh, terpadu, dan berkelanjutan.

### **Saran**

Diharapkan dari pemerintah daerah adalah (1) meningkatkan alokasi anggaran: Pemerintah daerah harus memprioritaskan pembiayaan pendidikan dengan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk infrastruktur, pengembangan tenaga pengajar, dan pemenuhan kebutuhan siswa, (2) memperkuat koordinasi: Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memastikan sinergi dalam kebijakan dan program Pendidikan, (3) mendorong program beasiswa: Pemerintah daerah dapat memperluas program beasiswa untuk anak-anak Papua yang kurang mampu secara finansial, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, (4) peningkatan pelatihan tenaga pengajar: Pemerintah daerah harus mengutamakan pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar yang berkualitas, termasuk meningkatkan ketersediaan guru yang berkualifikasi di daerah terpencil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- (UNICEF), U. N. C. F. (2017). Papua: Learning from Within. *UNICEF Indonesia Untuk Setiap Anal.* <https://www.unicef.org/indonesia/id/reports/papua-learning-within-2017>
- Bank, W. (2018). Papua New Guinea Education Sector Performance Report. *OKR OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY BETA.* <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30060>
- Fauzan, A. B. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan, 4(2).*
- Ihsan, N. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 22(1).*
- Kusumaningrum, D., & Sakarinto, W. (2016). Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 22(2).*
- Programme, U. N. D. (2018). Papua New Guinea National Human Development Report 2017. *Human Development Report.* [http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr2017\\_papua\\_new\\_guinea.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr2017_papua_new_guinea.pdf)
- RI, B. (2017). UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua. *JDIH DATABASE PERATURAN BPK RI.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37623/uu-no-21-tahun-2001>
- UNESCO. (2017). Education Financing Challenges and Opportunities in Papua Province, Indonesia. *UNESDOC DIGITAL LIBRARY.* <http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002616/261636E.pdf>
- Widhiarto, I. (2013). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan, 1(1).*
- World Bank. (2018). Financing Education. *Financing Education.* <https://www.worldbank.org/en/topic/edufinance>
- Yulianto, A., & H. (2015). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan, 3(2).*